

Ali Usman, Ketua PATAKA

Upaya Ketahanan Pangan Masyarakat: Asa Ambang Batas Cadangan Beras, Pengendalian Harga dan Inflasi

DASAR PEMIKIRAN

Penyelenggaraan ketahanan pangan melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diupayakan penyerapan produksi dalam negeri, hal ini guna menjaga kepastian harga gabah di level petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. Disisi lain, ancaman krisis pangan masih menggemakan di belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Isu krisis pangan tidak hanya menjaga ketahanan pangan masyarakat dan menjaga keterjangkauan harga untuk menjaga daya beli. Hinggaantisipasi inflasi akibat kenaikan harga beras. Selama ini beras merupakan komoditas ketahanan pangan utama Indonesia. Namun beras rentan penyumbang inflasi tertinggi pada kelompok makanan.

KAJIAN EMPIRIS

Stock hand beras BULOG hanya 651 ribu ton. Padahal stok beras BULOG harus berada di ambang minimal 1,2 juta ton hingga akhir 2022. Artinya BULOG kekurangan stok beras sekitar 500 ribu ton. Pemenuhan beras BULOG ditujukan untuk menjaga psikologi pasar agar tetap terjaga di koridor harga yang diinginkan oleh pemerintah. Sebelum adanya polemik wacana impor beras. Sejak 2 September 2022 BULOG mendapatkan penguasaan pemerintah dan telah berupaya meningkatkan stok CBP sebesar 500 ribu ton. Sampai hari ini target beras BULOG tidak terisi. Hal ini bertentangan dengan penghargaan presiden oleh *International Rice Research Institute* (IRRI) yang mengatakan swasembada beras dan surplus.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perlu langkah konkret dari pemerintah agar jangan sampai permintaan pasar mengalami kekurangan stok jika perlu pemerintah harus sesegera mungkin melakukan impor.
2. Masalah pangan harus dipersiapkan dengan baik karena

Negara yang baik adalah negara yang sudah bisa mengantisipasi.

3. Perlu pengembangan diversifikasi pangan karena selama ini masih ketergantungan pada komoditas beras.
4. Perlu dilakukan harmonisasi data oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang mengelola pangan nasional dengan 11 komoditas. Karena ada perbedaan kepentingan antar kementerian untuk menjaga kinerja masing-masing.
5. Apabila pengadaan dari dalam negeri tidak memungkinkan solusi yang tersisa adalah impor. Namun pemerintah harus dipertimbangkan dengan hati-hati
6. Perlu mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan agar terintegrasi hulu hingga hilir. Selama ini di hulu BULOG diwajibkan melakukan penyerapan, namun di hilir tidak diberikan outlet yang pasti dan jumlahnya besar.
7. Perlu melakukan reformasi kebijakan disesuaikan dengan cara mengisi sebagian CBP dengan beras multikualitas.
8. PT Pupuk Indonesia harus ditransformasikan menjadi satu produsen pupuk yang terintegrasi dengan jasa pemupukan dari petani dan reforma agraria harus naik satu step melakukan konsolidasi besar-besaran.
9. BULOG perlu mengembangkan manajemen stok dan fungsi komersial di pasar regional agar mempunyai stok yang diperdagangkan di pasar regional. Dan sewaktu-waktu bisa ditarik untuk kebutuhan dalam negeri sebagai alat untuk memenuhi kecukupan stok domestik. Hal ini lazim ketika BULOG diberikan kekuasaan untuk fungsi komersial.
10. Penting untuk merefleksikan kembali dan mempertimbangkan kembali data-data KSA BPS terutama data surplus agar tetap ada *critist system*.
11. Pemerintah perlu memastikan iklim dan ketersediaan air yang baik diikuti ketersediaan sarana produksi.
12. Perdebatan impor dan tidak impor perlu segera diputuskan karena semakin lama ditunda masalah akan semakin sulit dimitigasi dan ada implikasi-implikasi ada hal-hal yang harus dihitung ketika memutuskan impor agar bisa di mitigasi dan seminimal mungkin.
13. Koordinasi antar Lembaga menjadi penting karena tidak bisa bertindak sendiri-sendiri baik Kementerian Pertanian, perdagangan dan lainnya. BAPANAS mempunyai peran yang penting sebagai Lembaga baru bagaimana menempatkannya. Perlu adanya harmonisasi antara kebijakan produksi dengan kebijakan konsumsinya.